

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah salah satu kekayaan sumberdaya alam yang banyak memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Masyarakat yang menghuni hutan sebagai tempat tinggal, mereka memiliki ciri khas tertentu sebagai masyarakat hutan, ciri tersebut adalah rata-rata masyarakat hutan menggantungkan sepenuh hidupnya pada hutan atau tanah yang mereka miliki sebagai perekonomian mereka. Pada umumnya kehidupan masyarakat hutan identik dengan kehidupan miskin dan terbelakang. Tidak ada aturan khusus pada Undang-Undang yang mengatur larangan masyarakat untuk tinggal dalam kawasan hutan. Hutan adalah aset bagi kehidupan masyarakat disekitarnya dan juga aset bagi negara sebagai sumber devisa.

Hutan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, berisikan mengenai ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, yang dimaksud hutan adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.¹

¹ Departemen Kehutanan., *Manual Kehutanan*, (Jakarta: Departemen Kehutanan, 1992), hlm. 52.

Hutan memiliki tiga macam fungsi, fungsi ekologis, fungsi sosial dan fungsi ekonomis dengan disertai kemampuan pengembangan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi maka pemanfaatan sumber daya hutan sesuai fungsinya akan menjamin kelangsungan manfaat hutan secara keseluruhan. Salah satu fungsi dan manfaat hutan adalah perolehan devisa yang berasal dari kayu yang dihasilkan. Di Pulau Jawa khususnya lebih dominan memiliki hutan jati yang tersebar diberbagai wilayah dan diolah oleh negara yang kemudian tersusun dalam bentuk badan yang bernama Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Kuasa Pertambangan, Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), Hak Guna Dasar (HGD) untuk perkebunan maupun hutan produksi².

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.30 tahun 2003 pasal 3, hutan tanaman di Jawa dikelola oleh BUMN Perum Perhutani. Terdapat lima tugas utama Perum Perhutani sebagai pengelola hutan di Jawa yaitu kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana kelola, pemanfaatan dan reklamasi, perlindungan dan konservasi alam. Efektifitas dan efisiensi kegiatan pengolahan hutan, organisasi Perum Perhutani di Jawa dibagi menjadi tiga unit kerja yaitu Perhutani Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur dan Unit III Jawa Barat. Operasional kegiatan teknis kehutanan di Perhutani berada pada tingkat KPH. Secara administrasi KPH terdiri dari beberapa Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) dan BKPH terdiri dari beberapa Resort Pemangku Hutan (RPH).

² Sutaryono., *Pemberdayaan Setengah Hati Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengolahan Hutan*, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2008), hlm 4-5.

Pada masa Orde Baru berbagai persoalan sosial muncul hampir di sebagian wilayah Indonesia. Persoalan sosial tersebut seperti kekerasan, penjarahan, bahkan konflik yang selama ini tidak terselesaikan. Tidak itu saja permasalahan yang terjadi, pada masyarakat hutan juga mengalami permasalahan yang cukup kompleks dengan adanya monopoli hutan oleh negara (Perum Perhutani) dan segelintir pengusaha melalui HPH³. Bentuk perlawanan dari masyarakat sangat bervariasi, salah satunya adalah pencabutan tanaman, pencurian secara individual, pencurian secara terorganisir, penjarahan hingga teror fisik kepada aparat Perum Perhutani.

Sesuai dengan paradigma pengolahan hutan, masyarakat merupakan salah satu unsur dalam sistem pengolahan sumberdaya hutan, sehingga keberadaan hutan memberikan banyak hal untuk masyarakat sekitar hutan dalam hal sosial ekonomi maupun untuk kelangsungan hutan itu sendiri.

Pada awal masyarakat tinggal di kawasan hutan sudah terbiasa hidup dengan mengandalkan potensi hutan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hampir sebagian besar pola hidup masyarakat hutan dipengaruhi oleh pertumbuhan hutan, mulai dari mata pencaharian masyarakat hingga sosial budaya yang terjalin erat dalam kehidupan sehari-harinya. Sejak kawasan hutan dikelola oleh Pemerintah Kolonial Belanda maupun Perum Perhutani konflik mulai berdatangan satu persatu oleh adanya aturan pembatasan masyarakat masuk wilayah hutan dengan berbagai alasan. Masyarakat mulai diperlakukan tidak adil dengan adanya pembatasan dalam pengolahan maupun pelestarian hutan, sedangkan pada kehidupan sehari-hari

³ *Ibid.*, hlm.7.

beberapa masyarakat telah membuka lahan *tumpangsari*⁴ di kawasan hutan untuk menghasilkan tanaman jagung, kentang, kacang, ketela pohon dan porang sebagai penghasilan tambahan jika sawah yang mereka miliki tidak menguntungkan. Namun dari fenomena yang terjadi inilah muncul kesenjangan sosial yang mengakibatkan adanya pola ekonomi masyarakat hutan yang tidak stabil dan berbagai tindak kejahatan yang terjadi pada kawasan hutan.

Sejak pertengahan abad XIX, terjadi beberapa gerakan sosial yang meresahkan masyarakat sekitar masyarakat desa yang tinggal didekat hutan. Beberapa kasus yang terjadi adalah kasus pengkecuan. Gerombolan *kecu*⁵ menempati perbatasan-perbatasan yang strategis dengan karesidenan Yogyakarta, Semarang dan Madiun⁶. Wilayah hutan Ngawi adalah wilayah dari Karesidenan Madiun yang juga mengalami kasus pengkecuan, namun terjadi juga kasus pembegalan, kebakaran, pencurian hewan dan pembunuhan. Salah satu faktor dari terjadinya tindak kejahatan adalah faktor ekonomi desa hutan, dan adanya eksploitasi oleh Kolonial⁷. Semua

⁴ Istilah *tumpangsari* diadaptasi dari sistem *Taungya* yang dipraktikkan di Burma. *Taungya* artinya “*pertanian gunung*” atau “*upland agriculture*”. Pada tahun 1856 penguasa Inggris di Burma menerapkan sistem *Taungya* untuk peremajaan hutan jati dan cukup berhasil. Dari sinilah Pemerintah Hindia Belanda mengadopsi sistem itu untuk penanaman jati di Jawa yang kemudian dikenal dengan istilah *tumpangsari*.

⁵ *Kecu* adalah salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang untuk menjarah barang orang lain. Para *kecu* melaksanakan aksinya khusus pada wilayah hutan yang dikenal dengan istilah *pengkecuan*.

⁶ Suhartono., *Apanage dan Bekel*, (Yogyakarta; PT Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. 155.

⁷ Wardo, “The Social Banditry In The Rural Areas Of Rembang By The End Of The 19th Century And At The Beginning Of The 20th Century”, *Tawarikh International Journal For Historical Studies* 3-1-2011, hlm. 47.

kejadian tersebut dapat terjadi karena tidak adanya kesinambungan antara masyarakat yang dirugikan maupun pihak pengelola hutan yang tidak dapat bekerjasama.

Beralih dari masa Kolonial Belanda, pengolahan hutan masa kemerdekaan hingga masa Orde Baru mengalami pasang surut yang cukup berarti dalam bidang perekonomian masyarakat serta permasalahan yang timbul dari pengolahan hutan masa Orde Baru. Tahun 1970 hingga tahun 1990 peran negara dalam pengolahan hutan dinilai sangat dominan. Dominasi peran negara dalam pengolahan hutan memberikan dampak negatif maupun positif bagi masyarakat sekitar hutan. Perubahan sistem sentralistik menuju desentralisasi pada pengolahan hutan masa Orde Baru menyisakan beberapa permasalahan yang mendasar yaitu permasalahan yang terjadi pada penurunan kualitas sumber daya hutan dan ekosistemnya, proses marginalisasi dan kemiskinan, serta konflik kepentingan dalam pengolahan hutan.

Transformasi dalam masyarakat hutan di wilayah KPH Ngawi tahun 1966-1998 terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, salah satunya adalah adanya perubahan sosial ekonomi dari dampak perubahan sistem sentralistik menuju desentralisasi pengolahan hutan yang mengakibatkan terjadinya beberapa masalah yang berkaitan mengenai kemiskinan yang mengacu pada perubahan mata pencaharian penduduk sekitar hutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transformasi sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat hutan di wilayah KPH Ngawi tahun 1966-1998?
2. Bagaimana transformasi sosial budaya masyarakat hutan di wilayah KPH Ngawi tahun 1966-1998?
3. Bagaimana dinamika perubahan petani pesanggem di wilayah KPH Ngawi tahun 1966-1998?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diungkap, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana proses transformasi sosial ekonomi masyarakat hutan di wilayah KPH Ngawi tahun 1966-1998.
2. Mengetahui bagaimana transformasi sosial budaya yang terjadi pada masyarakat hutan di wilayah KPH Ngawi pada tahun 1966-1998 .
3. Mengetahui bagaimana dinamika perubahan petani pesanggem yang terjadi pada tahun 1966-1998.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kajian pengetahuan dalam ilmu sejarah, terutama kajian mengenai kehutanan terlebih pada transformasi masyarakat hutan yang berada di wilayah KPH Ngawi pada tahun 1966-1998. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penulisan sosial masyarakat bagi kalangan mahasiswa dan bagi pemerintah daerah Ngawi dan sekitarnya serta sebagai bahan kajian penelitian.

2. Manfaat Teoritik

Studi ini juga dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas tentang transformasi masyarakat hutan di wilayah KPH Ngawi. Pembahasan yang akan ditulis ialah mengenai berbagai hal yang terjadi pada masyarakat hutan, terutama berkaitan dengan perubahan masyarakat hutan yang disebabkan pada pertumbuhan hutan yang mempengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan dan penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Buku yang berjudul *Sosiologi Suatu Pengantar*, karya Soerjono Soekamto, bercerita mengenai kegunaan ilmu sosiologi dalam menelaah unsur-unsur status dalam masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dalam kehidupan sosial maupun dalam kebudayaan dalam suatu bermasyarakat. Pada dasarnya ilmu sosiologi memiliki kegunaan besar dalam kegunaannya untuk menganalisa kekuatan-kekuatan sosial di dalam suatu masyarakat yang berada dalam proses pertumbuhan, baik pertumbuhan itu masih dalam taraf yang rendah, maupun sudah dalam tingkat yang tinggi. Konsep transformasi yang ditekankan Soerjono Soekamto dalam tulisannya tertuju pada konsep transformasi dalam modernisasi. Modernisasi menurut Soerjono Soekamto adalah modernisasi merupakan suatu bentuk dari perubahan sosial yang terarah (*direct change*) dan berdasarkan pada suatu perencanaan (*social planning*).

Proses transformasi timbul dari kajian historis yang menunjukkan terjadinya perubahan fundamental dari masyarakat agraris tradisional ke masyarakat industrial, atau pula suatu proses transformasi dari masyarakat primitif ke masyarakat yang lebih maju dan prosesnya berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Buku ini mencakup mengenai proses terjadinya transformasi pada masyarakat hutan terutama pada bidang sosial ekonomi dan budayanya, yang menekankan pada faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya transformasi sosial dalam sebuah masyarakat.

Buku yang berjudul *Apanage dan Bekel*, karya Suhartono. Buku ini bercerita mengenai latar belakang sosial ekonomi dari sistem apanage dan perubahan sosial yang terjadi dipedesaan Surakarta tahun 1830-1920. Penjelasan itu memberikan petunjuk bahwa kedudukan tanah apanage dan perubahan peranan bekel yang erat kaitannya dengan modernisasi kolonial. Disamping itu juga terdapat ulasan mengenai berbagai macam pengertian petani dan segala kegiatan tentang penguasaan dan pengolahan tanah yang berada di desa. Buku *Apanage dan Bekel* menceritakan mengenai gambaran struktural pemerintahan desa serta melibatkan peranan bekel untuk menguasai faktor-faktor produksi, selain itu juga terdapat ulasan yang membahas mengenai tindakan sosial yang meresahkan masyarakat desa. Tindakan ini termasuk dalam kegiatan yang erat kaitannya dengan kejahatan. Tindak kejahatan ini terjadi diwilayah pedesaan seperti kasus pengkecuan, pembegalan, kebakaran, pencurian ternak dan pembunuhan. Tindakan yang tertera di atas sering dan hampir terjadi disetiap kawasan hutan yang memiliki pemukiman. Buku ini dijadikan kajian pustaka karena isi dalam buku ini termasuk dalam tema skripsi yang berkaitan tentang transformasi masyarakat hutan yang dalam penulisan skripsi tersebut akan diulas beberapa mengenai tindak kejahatan di wilayah hutan, secara tidak langsung dalam kawasan hutan terdapat masyarakat yang menghuni kawasan tersebut, dan tindak kejahatan tersebut sering terjadi karena kawasan pemukiman masyarakat desa tergolong sepi dan terdapat jarak yang sangat jauh dari wilayah kota. Dari kejadian tindak kejahatan inilah yang diakibatkan oleh faktor ekonomi masyarakat hutan yang hanya tergantung pada sumberdaya hutan dan lahan sekitar hutan.

Buku yang berjudul *Politik Kehutanan Masyarakat*, karya San Afri Awang, menceritakan mengenai politik yang terjadi pada masyarakat hutan. Didalam ulasannya kapitalisme telah masuk dalam pengolahan sumber daya hutan. Selain itu juga buku ini menjelaskan mengenai fungsi hutan secara menyeluruh bagi masyarakat yang tinggal dekat kawasan hutan. Disamping itu juga selain bermanfaat bagi masyarakat, hutan juga bermanfaat dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Di dalam buku ini juga menulis kejadian mengenai kerusakan hutan, yaitu kebakaran hutan. Pada buku sebelumnya yaitu buku karya Suhartono yang berjudul *Apanage dan Bekel*, kebakaran hutan adalah salah satu tindak kejahatan selain *begal* dan *kecu*. Namun dalam buku *Politik Kehutanan Masyarakat*, kebakaran hutan merupakan suatu permasalahan yang terjadi pada tahun 1997 hingga sekarang yang melanda hutan kawasan Indonesia.

Karena permasalahan inilah muncul beberapa dampak yang akan terjadi pada sosial ekonomi masyarakat, kerusakan lingkungan sumber daya hutan, dampak kultural dan ekologis. Buku ini dijadikan kajian pustaka karena sebagian dari isi buku tersebut dapat membantu dalam penulisan tema skripsi yang berkaitan dengan kondisi wilayah hutan dan beberapa gerakan maupun gambaran umum mengenai masyarakat yang tinggal dikawasan hutan serta beberapa dampak dari adanya kebakaran hutan terhadap perekonomian masyarakat setempat maupun pihak dari pengelola hutan itu sendiri.

Buku berjudul *Pemberdayaan Setengah Hati, Sub Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan* karya Sutaryono. Buku ini menuliskan beberapa pembahasan

mengenai perkembangan masyarakat sekitar hutan jati, bagaimana mereka hidup, bagaimana tradisi dan budaya masyarakat, bagaimana mereka harus hidup dan bekerja, serta kemampuan diri untuk berpikir dalam menjalankan hidup. Terlebih lagi mengenai hubungan masyarakat dengan sumberdaya hutan, dominasi negara dan kapitalisme terhadap hutan, serta pemberdayaan masyarakat terhadap hutan dan suatu organisasi atau badan yang menaungi hutan seperti KPH dsb. Buku ini dijadikan dalam kajian pustaka karena isi serta pembahasan buku ini mencakup materi yang akan ditulis mengenai masyarakat hutan dan perkembangannya. Buku ini juga menceritakan sejarah dari lahirnya Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) dan tugas KPH sebagai perusahaan yang memiliki otoritas melakukan pengolahan hutan atas nama negara, yang sebelumnya juga pemerintah kolonial belanda juga menerapkan tata cara yang sama dalam penguasaan hutan hingga sekarang pola dari penerapan pemerintah kolonial tercermin dari KPH.

Buku berjudul *Desa Hutan Dalam Perubahan, Eksploitasi Kolonial Terhadap Sumberdaya Lokal di Karesidenan Rembang 1865-1940* karya Wartyo, bercerita mengenai masyarakat desa hutan di Karesiden Rembang yang mengalami beberapa perubahan dari segi ekonomi dan kebijakan politik kehutanan yang berdampak luas pada perkembangan masyarakat desa. Perubahan masyarakat desa dibedakan menjadi tiga tahap, tahap pertama terjadi pada tahun 1865-1890 yang berisikan mengenai peralihan dari masyarakat tradisi yang relatif mandiri menjadi masyarakat yang ter subordinasi dan termarjinasikan oleh kekuatan eksternal. Tahap kedua tahun 1890-1920 merupakan masa adaptasi dan penyesuaian struktural dan tahap ketiga pada

tahun 1920-1940 adalah masa stagnasi dan involusi. Selain itu menceritakan mengenai peristiwa alih fungsi hutan yang semula milik komunal berubah menjadi komoditas yang dikuasai kekuatan asing (pemerintah Kolonial Belanda maupun pihak swasta). Akibat dari kekuasaan asing yang berperan dalam pengolahan fungsi hutan menyebabkan banyaknya aturan dan larangan untuk masyarakat sekitar hutan jati agar tidak memasuki kawasan hutan serta mengambil dan memanfaatkan potensi hutan sebagai sumber kebutuhan ekonomi mereka. Pemerintah Kolonial juga banyak berperan dalam pengolahan hutan pada saat itu, dalam hal eksploitasi hingga degradasi hutan yang mengakibatkan pada kerusakan hutan. Buku ini dijadikan sebagai kajian pustaka dalam penulisan skripsi karena isi dan penjelasan yang sudah dipaparkan pada buku ini banyak dituliskan mengenai materi yang berkaitan dengan transformasi masyarakat hutan dalam bidang sosial ekonomi, masalah-masalah yang terjadi berkaitan dengan pengelolaan hutan, kondisi masyarakat hutan, budaya serta tradisi masyarakat hutan. Untuk itu buku ini sangat cocok digunakan sebagai kajian pustaka untuk melengkapi penulisan skripsi.

Buku karya Arifin Arief yang berjudul *Hutan Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Lingkungan*. Buku ini berisikan hubungan hutan dengan lingkungan sekitar yang saling membutuhkan, dimana keduanya saling ketergantungan antara hutan itu sendiri kepada manusia untuk merawat dan menjaganya, maupun pada manusia itu sendiri yang mengambil hasil hutan untuk kebutuhan hidup mereka. Selain itu juga adanya hubungan dengan iklim maupun makhluk hidup yang lainnya seperti hewan maupun hewan mikrobiologi yang membantu dalam kesuburan tanaman maupun

tanah. Buku ini digunakan sebagai kajian pustaka karena pembahasan dalam buku ini mencakup dalam pembahasan dalam penulisan skripsi yang berkaitan dengan hutan dan pengaruhnya terhadap lingkungan masyarakat sekitar hutan.

Buku *Tindak Pidana Illegal Logging* karya Winarno Budyatmojo. Isi dari buku ini ialah mengenai beberapa pengertian yang berkaitan dengan adanya tindak kejahatan yang sering terjadi pada kawasan hutan. Selain itu juga banyak membahas mengenai praktek dari tindak *illegal logging* dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya hingga alur dari tindakan penebangan liar tersebut. Pada buku ini dilengkapi pasal-pasal dari setiap tindak pidana kejahatan hutan serta aturan-aturan dari pemeliharaan serta pelestarian hutan dan kehutanan. Isi buku ini sangat membantu dalam penulisan skripsi karena sub dari pembahasan pada buku ini mengulas bagaimana setiap tindak kejahatan dapat merugikan masyarakat sekitar hutan dari segi sosial ekonominya. Oleh karena itu buku ini dapat dijadikan sebagai kajian pustaka dalam penulisan skripsi pada bab II yang akan membahas budaya yang mengalami perubahan hingga munculnya tindak kejahatan sosial.

Buku berjudul *Hutan Jati dan Kemakmuran, Problematika dan Strategi Pemecahannya* karya Hasanu Simon, bercerita mengenai peranan hutan jati di Karesidenan Madiun terhadap pemecahan masalah degradasi hutan serta mengatasi masalah sosial yang menyebabkan kerusakan hutan yang akan berimbas kepada masyarakat sekitar hutan. Selain itu buku ini lebih menekankan prinsip untuk

menjaga dan meningkatkan kemakmuran masyarakat setempat dan menjaga peranan hutan sebagai pelindung lingkungan hidup. Buku ini mencakup secara mendasar mengenai berbagai tata cara pengolahan hutan jati, bagaimana lingkungan sosial ekonominya, masalah umum dan pemecahan masalah yang terjadi dan implikasi kebijakan pengelolaan hutan. Oleh itu buku ini dijadikan sebagai kajian pustaka dalam penulisan skripsi untuk membantu menjawab segala permasalahan yang tertulis pada rumusan masalah terutama pada bab IV yang akan membahas mengenai kondisi masyarakat hutan dalam mengelola hutan dan menjaga kemakmurannya.

Hananto Widhiaksono, 2002, *Upaya Mempertahankan Kelestarian Hutan Dengan Memanfaatkan Kearifan Local Pada Masyarakat Desa Hutan*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, memberikan pengetahuan mengenai gambaran umum dari ilmu ekologi yang berkaitan dengan hubungan suatu wilayah yang akan memunculkan budaya baru. Seperti halnya yang dimiliki masyarakat desa hutan yang memiliki beberapa nilai-nilai kearifan local yang mengandung benih konflik dan kerawanan terhadap kelestarian hutan itu sendiri. Ketika budaya masyarakat berkembang secara dinamis, dari segi cara berpikir masyarakat maka dapat dikhawatirkan akan muncul keinginan untuk menuntut hak yang lebih besar dari pada apa yang telah didapatkan selama ini.

Kelestarian hutan yang terbentuk pada saat ini hanyalah kelestarian hutan tetapi kelestarian pengelolaan hutan belum terwujud. Pada intinya pengelolaan hutan adalah kesejahteraan seluruh warga dan pelaku kehutanan serta bagi lingkungan hutan itu sendiri. Implementasi bagi penulisan skripsi ialah adanya keterikatan antara

hutan dengan masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan. Keterikatan ini lah yang akan memunculkan suatu adanya karakteristik tertentu yang akan menghasilkan sebuah interaksi dan hubungan timbal balik antara hutan dan masyarakat dan akan terbentuk suatu adanya budaya.

F. Metode Penelitian

Metode yang sangat relevan untuk mendeskripsikan kembali kondisi dan segala yang terjadi pada kurun waktu tersebut adalah metode sejarah. Penelitian ini dilakukan melalui proses penggalian dokumen sebagai sumber sejarah. Dokumen dalam hal ini diartikan sebagai jejak yang tertinggal dan dapat dilacak sebab peristiwa dan kejadian riil tersebut telah berlalu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Menurut Nugroho Notosusanto metode historis adalah kumpulan prinsip-prinsip atau aturan yang sistematis, dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan untuk penulisan sejarah, menilai secara kritis dan menyajikan suatu sintesa dalam bentuk tulisan.⁸ Sementara itu, Winarno Surakhmad berpendapat bahwa metode historis adalah sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul pada masa lampau untuk menentukan generalisasi yang berguna untuk memahami kejadian-kejadian

⁸ Nugroho Notosusanto., *Masalah Penelitian Sejarah, Suatu Pengalaman*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), hlm. 1.

sejarah.⁹ Metode sejarah merupakan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.¹⁰

Mengingat cakupan penelitian ini adalah penelitian sejarah, maka prosedur penelitian yang dijalani pun menggunakan tahapan-tahapan dalam metode sejarah. Metode sejarah bertumpu pada empat tahapan penelitian, antara lain:

a. Pengumpulan Data/ Heuristik

Pengumpulan data-data dalam studi ini didapatkan melalui sumber tertulis dengan melakukan studi pustaka dan sumber lisan melalui wawancara. Kedua sumber tersebut dapat dikategorikan ke dalam sumber primer dan sumber sekunder. Studi pustaka dilakukan sebagai unit kerja dalam proses pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder. Untuk mengetahui validitas penulisan digunakan sumber primer. Sumber primer yang dimaksud yakni arsip-arsip yang terdapat di kantor Biroren Malang dan KPH Ngawi.

Adapun teknik pengumpulan data tersebut, yaitu:

1) Studi Dokumen

Dokumen primer yang digunakan berupa arsip-arsip berkenaan dengan masalah yang berkaitan dengan hutan atau kehutanan serta sumber-sumber dokumen mengenai sosial masyarakat hutan pada tahun 1966-1989.

⁹ Winarno Surakhmad., *Pengantar Penelitian: Dasar, Metode dan Tehnik*, (Bandung: Tarsito,1994), hlm. 132.

¹⁰ Goutschalk, Louis., *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), hlm. 32.

Fokus penelitian ini adalah peristiwa yang lampau dan fokus masalah penelitian ini tertuju pada transformasi yang terjadi pada masyarakat hutan, maka salah satu sumber yang digunakan adalah sumber dokumen. Dokumen yang akan digunakan berupa arsip sejarah Berita Acara Tata Batas 1923 oleh pihak Belanda kepada pemerintah Kabupaten Ngawi yang berupa peta pada setiap *Houtvesterij*, selain itu juga arsip kontak kerjasama antara petani *pesanggem* dengan pihak perhutani.

2) Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah suatu metode yang dipergunakan untuk tujuan tertentu dan tugas tertentu pula, dan mencoba mendapatkan keterangan (pendirian) secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain. Cara ini berguna untuk mendapatkan sumber lisan dari orang yang mengalami peristiwa itu.¹¹ Pada kesempatan ini untuk mendapatkan data dari narasumber diadakan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu Tarso dan Budi sebagai narasumber dari KPH Ngawi, Suraji, Karmi, Sonah sebagai petani *pesanggem*.

3) Studi Pustaka

Studi pustaka dimaksudkan untuk membuat kerangka pikir penulisan, pengujian teori dan konsep. Tahapan ini dilakukan dengan studi pustaka dari buku yang berisi persoalan-persoalan yang akan dibahas. Hal ini bertujuan untuk

¹¹ Koentjaraningrat., *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1983), hlm. 162-196.

memperoleh pemahaman yang luas tentang permasalahan. Studi pustaka juga memberikan informasi awal untuk pelacakan data lebih lanjut. Studi pustaka penulis lakukan di Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa, UPT Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret, Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Perpustakaan Ignatius Yogyakarta.

b. Penyeleksian Data/ Kritik Sumber

Kritik sumber yaitu memilih dan memilah sumber yang akurat dan menyeleksi sumber-sumber sejarah yang ada untuk memperoleh informasi yang benar. Keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan tentang keshahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern wajib dilaksanakan. Tujuan dari kegiatan ini ialah bahwa setelah sejarawan berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitiannya, ia tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum pada sumber-sumber itu. Penyaringan harus dilakukan secara kritis, terutama terhadap sumber-sumber pertama agar terjaring fakta terpilih. Pertimbangan pertama untuk menyeleksi sumber yang telah terbukti keasliannya ialah dengan melihat fakta sesuai konteks waktu, sezaman atau tidak dengan periodisasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya sumber tersebut dinilai lagi dari segi informasi yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan bahasan yang diteliti ataukah tidak, informasi tersebut dapat dipercaya ataukah tidak, setelah itu, terjaringlah fakta-fakta terpilih.

c. Penafsiran Data/ Interpretasi

Tahapan ini sering disebut sebagai analisis sejarah, yaitu menguraikan fakta sejarah dengan menggunakan pendekatan. Tahap ini terbagi menjadi dua bagian yaitu analisa dan sintesa. Analisa adalah menguraikan data dengan memperhatikan aspek kausalitas, sedangkan sintesa adalah penyatuan keduanya. Data dianalisa dengan analisis deskriptif, yaitu suatu analisa yang didasarkan pada hubungan sebab akibat dari suatu fenomena historis dalam situasi tertentu untuk menggambarkan suatu fenomena beserta ciri-ciri khusus yang terdapat dalam fenomena tersebut.

Digunakannya analisa deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membantu berpikir secara diakronik. Dasar berpikir diakronik ini melihat urutan suatu peristiwa secara prosesual yang didasarkan pada aspek-aspek kronologis waktu. Di samping itu, masalah objektivitas dalam studi ini juga menjadi pertimbangan untuk diperhatikan. Namun demikian, objektivitas yang mutlak ada pada peristiwa itu sendiri.

d. Penyajian Data/ Historiografi

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, dan pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Penulisan yang disajikan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai proses penelitian serta menyumbangkan wacana baru.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini mengkaji mengenai Transformasi Masyarakat Hutan Di wilayah KPH Ngawi Tahun 1966-1998. Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II, dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum mengenai kondisi geografis di wilayah Ngawi pada tahun 1966-1998. Pada bab II menguraikan mengenai gambaran umum Kabupaten Ngawi serta perkembangan sosial ekonomi, kemudian mengenai administrasi dan kependudukan serta pendukung ekonomi baru bagi masyarakat sekitar hutan.

BAB III, dalam bab ini membahas mengenai bagaimana transformasi sosial budaya yang terjadi di masyarakat hutan wilayah KPH Ngawi pada tahun 1966-1998. Penulisan pada bab III ini mengacu pada rumusan masalah point ke dua yang membahas mengenai gambaran umum mengenai transformasi sosial budaya masyarakat hutan dalam bidang budaya yang terjadi.

BAB IV, dalam bab ini diuraikan mengenai bagaimana dinamika perubahan petani *pesanggem* masyarakat hutan di wilayah KPH Ngawi pada tahun 1966-1998. Pada bab ini membahas mengenai wajah kehutanan KPH Ngawi masa Orde Baru,

commit to user

potret kepengurusan, permasalahan kehutanan, gangguan keamanan hutan serta peluang ekonomi baru petani *pesanggem*.

BAB V, merupakan bab penutup dan merupakan kesimpulan dari bab sebelumnya yang membahas mengenai transformasi masyarakat hutan di wilayah KPH Ngawi pada tahun 1966-1998.

